

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA JAMBI
TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

1. Nama Organisasi : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan, meliputi: Hubungan antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, persatuan dan kesatuan bangsa, strategi daerah sesuai dengan ideologi Pancasila, membantu pelayanan perlindungan masyarakat terhadap bencana dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;
 - e. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. Pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	Uraian	Alasan
a.	Jumlah kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
b.	Peningkatan jumlah dan kualitas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik	
c.	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dibidang kesatuan bangsa dan politik	
d.	Jumlah parpol dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	
e.	Peningkatan kuantitas dan kualitas koordinasi dibidang kesatuan bangsa dan politik	
f.	Peningkatan hubungan kerjasama lintas SKPD dan institusi non pemerintah	
g.	Peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan pemberian rekomendasi izin organisasi kemasyarakatan dan riset	
h.	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan oleh auditor eksternal	

i.	Peningkatan indeks persepsi korupsi	
----	-------------------------------------	--

1. Nama Organisasi : **Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi**
2. Tugas : Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan umum keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja dengan bidang-bidang;
 - c. Pembinaan administrasi dibidang kesekretariatan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
 - e. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), pentapan kinerja (TAPKIN), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
 - f. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran kesekretariatan dan bidang-bidang;
 - g. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian, dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan berbagai dokumen tersebut	Agenda surat, dokumen kepegawaian, dokumen keuangan
b.	Jumlah pegawai Badan Kesbangpol yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Mengukur upaya yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas	Laporan kegiatan diklat, Bintek, dan Kursus

	structural, fungsional dan Bimbingan Teknis serta kursus lainnya.	pegawai dilingkungan Badan Kesbangpol	
c.	Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik	Mengukur efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor	Daftar Inventaris; Standar kebutuhan sarana dan prasaran
d.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Mengukur ketepatan penyelesaian berbagai dokumen perencanaan	Agenda surat/penomoran

1. Nama Organisasi : **Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah**

2. Tugas : Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan politik dan kewaspadaan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Rasio peningkatan jumlah frekuensi pengawasan WNA	Mengukur efektivitas kebijakan dibidang politik	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait.
b.	Rasio jumlah keberadaan Warga Negara Asing dalam periode tertentu.	Terdatanya Warga Negara Asing	2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi.
c.	Fasilitasi rekomendasi kewarganegaraan .		
d.	Jumlah peran serta partai politik yang ikut dalam pelaksanaan Pemilu	Mengukur efektivitas kebijakan dibidang politik	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, laporan

			dan evaluasi.
e.	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengamanan tetap tegaknya ideologi Pancasila dan kewaspadaan daerah	Mengukur efektifitas kegiatan pengawasan dan pengamanan tetap tegaknya ideologi Pancasila dan kewaspadaan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekwensi pengawasan dan pengamanan tetap tegaknya ideologi Pancasila dan kewaspadaan daerah 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi.
f.	Jumlah inventarisasi data mengenai kejadian yang bersifat anarkis dan makar	Mengukur efektifitas kegiatan inventarisasi data mengenai kejadian yang bersifat anarkis dan makar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekwensi adanya kejadian yang bersifat anarkis dan makar. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
g.	Jumlah inventarisasi data pengawasan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan	Mengukur efektifitas kegiatan inventarisasi data pengawasan adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi

h.	Jumlah koordinasi kegiatan Komunitas Intelijen Daerah	Mengukur efektifitas kegiatan koordinasi Komunitas Intelijen Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Komunitas Intelijen Daerah.2. Frekwensi kegiatan koordinasi Komunitas Intelijen Daerah.

1. Nama Organisasi : **Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**
2. Tugas : Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja, dan kegiatan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam bina ideology dan wawasan kebangsaan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah kegiatan pembauran bangsa dan jumlah terbentuknya forum pembauran kebangsaan	Mencegah terjadinya konflik antar etnis, suku dan ras.	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi.
b.	Jumlah pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap bekas tahanan dan narapidana G 30 S/PKI.	Mengukur efektifitas kegiatan pengawasan, pembinaan, dan pemantauan terhadap tahanan dan narapidana G 30 S/PKI.	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan, pembinaan, dan pemantauan terhadap tahanan dan narapidana G 30 S/PKI.

			2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
c.	Rasio peningkatan frekuensi pelaksanaan pembinaan dan jumlah kelompok/masyarakat dan generasi muda yang melalui pembinaan wawasan kebangsaan.	Mendorong peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan pada masyarakat dan generasi muda	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi.
d.	Rasio peningkatan pelaksanaan pembinaan rasa nasionalisme dikalangan masyarakat melalui penataran ketahanan bangsa.	Mendorong terciptanya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi.
e.	Rasio peningkatan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di tempat-tempat umum, iklan-iklan layanan masyarakat.	Menurunnya penggunaan bahasa asing ditempat-tempat umum	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi.
f.	Jumlah kegiatan pengkajian dan penyusunan program yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan	Mengukur efektifitas kegiatan pengkajian dan penyusunan program yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan dan penyusunan program wawasan kebangsaan. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
g	Frekuensi penerbitan rekomendasi penelitian dan izin keramaian	Memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian dan kegiatan keramaian oleh pihak yang	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait 2. Hasil verifikasi permohonan

		berkepentingan	pihak yang berkepentingan
--	--	----------------	---------------------------

1. Nama Organisasi: **Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**

2. Tugas : Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- c. Pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;
- e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah kegiatan seni budaya yang dapat meningkatkan ketahanan seni budaya	Mengukur efektifitas pegiat seni budaya dalam mempertahankannya	1. Rekapian pegiat seni budaya dari Komunitas seni budaya, Diknas dan Dispora Kota Jambi
b.	Jumlah kegiatan penyiapan bahan koordinasi dalam mengatasi permasalahan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	Mengukur efektifitas kegiatan korrdinasi dalam mengatasi permasalahan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan	1. Frekwensi kegiatan koordinasi dalam mengatasi permasalahan seni budaya, agama,

		ekonomi	kemasyarakatan dan ekonomi. 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
c.	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).	Mengukur efektifitas kegiatan koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerukunan Umat Beragam (FKUB) dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
d.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mengajukan rekomendasi bantuan kepada pemerintah daerah	Mengukur upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan.	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait. 2. Agenda surat, dokumen administrasi
e.	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan LSM yang melaksanakan pendaftaran keberadaannya di Kota Jambi.	Mengukur efektivitas kebijakan dibidang Ormas	1. Peraturan perundang-undangan yang terkait. 2. Laporan, Hasil monitoring, dan daftar inventaris

f.	Jumlah kegiatan usaha dibidang ekonomi yang dapat menjadi ketahanan ekonomi Kota Jambi	Dapat dilakukan fasilitasi dan koordinasi dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mencegah/mengurangi kecurangan yang mungkin terjadi yang dapat mengganggu kelancaran distribusi/ arus barang dan jasa di Kota Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan dari BPS 2. Peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Laporan dari Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindag dan KTSP serta BAPPEDA
----	--	--	--

Jambi, 15 Januari 2018

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA JAMBI**



LIPHAN PASARIBU, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590912 198002 1 001

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

1. Nama Organisasi : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan, meliputi: Hubungan antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, persatuan dan kesatuan bangsa, strategi daerah sesuai dengan ideologi Pancasila, membantu pelayanan perlindungan masyarakat terhadap bencana dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pelaksaaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;
 - e. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. Pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja:

NO	Uraian	Alasan
a.	Jumlah kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan masyarakat yang cinta bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan bekerjasama dan saling tolong menolong.
b.	Peningkatan jumlah dan kualitas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik	
c.	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dibidang kesatuan bangsa dan politik	
d.	Jumlah parpol dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	
e.	Peningkatan kuantitas dan kualitas koordinasi dibidang kesatuan bangsa dan politik	
f.	Peningkatan hubungan kerjasama lintas SKPD dan institusi non pemerintah	
g.	Peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan pemberian rekomendasi izin organisasi kemasyarakatan dan riset	
h.	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan oleh auditor eksternal	
i.	Peningkatan indeks persepsi korupsi	

KOTA : KOTA JAMBI

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

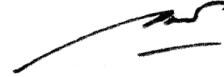
TUGAS DAN FUNGSI:

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2016	2017			TARGET AKHIR RPJMD 2018
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama	Persentase penyelesaian permasalahan keagamaan	NA	100	100%	100%	100	100%
2	Peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan, persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	1.Persentase jumlah Menurunnya angka konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan/etnis	NA	100	100%	100%	100	100%
3	Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi	1. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	NA	1,6	5%	10,4%	208	100%
		2. Kondisi daerah yang kondusif	NA	100	100%	100%	100	100%
RATA - RATA % CAPAIAN			-	75,40	53,75	77,6		100

Jambi, 15 Januari 2018

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KOTA JAMBI



LIPHAN PASARIBU, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590912 198002 1 001

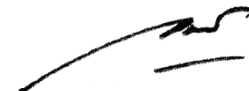
NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama	1.Persentase penyelesaian masalah keagamaan	100%	100%	100%	Badan Kesbangpol Kota Jambi dan Tim	1.FKUB 2. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	$y = x_1/x_2 \times 100 \%$ $y = 1/1 \times 100\%$ $y = 100\%$ $y = \text{Penyelesaian masalah keagamaan}$ $x_1 = \text{Jumlah masalah}$ $x_2 = \text{Jumlah masalah yang diselesaikan}$
2	Peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan, persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	1.Persentase jumlah Menurunnya angka konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan/etnis	100%	100%	100%	Badan Kesbangpol Kota Jambi dan Tim	1.PAKEM, FKDM dan FPK Kota Jambi 2.Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	$y = x_1/x_2 \times 100\%$ $y = \text{Persentase jumlah menurunnya angka konflik}$ $x_1 = \text{Jumlah konflik}$

							3. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah 4. Bidang Ideologi dan Wasbang	$x_2 =$ Jumlah konflik yang diatasi.
3	Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi	1. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 2. Kondisi daerah yang kondusif	5% 100%	1,04% 100%	20,8% 100%	Badan Kesbangpol Kota Jambi Tim	1. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 2. KPU Kota Jambi 3. Panwaslu Kota Jam	$y = x_1/x_2 \times 100 \%$ $y = 5/48$ $y = 10,4$ $y =$ Target yang ditetapkan $x_1 =$ Jumlah Ormas yang aktif $x_2 =$ Jumlah Ormas terdaftar

Jambi, 15 JANUARI 2018

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KOTA JAMBI



LIPHAN PASARIBU, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590912 198002 1 001